

DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Eugenia Christy, Een N Walewangko, Patrick Ch., Wauran
*Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
Email : 15061101042@student.unsrat.ac.id*

ABSTRAK

Penyerahan sumber-sumber pendanaan merupakan penyerahan perpajakan dan bantuan pendanaan melalui mekanisme Transfer ke Daerah sesuai prinsip *money follow program*. Prinsip *Money Follow Program* merupakan prinsip yang digunakan untuk menyusun program dengan menggunakan pendekatan penganggaran sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yaitu penganggaran yang terencana, menyeluruh (*holistic*), tematik (terfokus), dan lokasi yang jelas (parsial). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 2005 – 2018 di Sulawesi Utara. Analisis data menggunakan analisa rasio keuangan, regresi berganda, regresi sederhana dan uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa PAD dan Pendapatan Transfer tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio pertumbuhan keuangan daerah dan rasio efektivitas keuangan daerah, melainkan PAD dan Pendapatan Transfer berpengaruh signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah. PAD dan pendapatan transfer berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan kinerja keuangan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena itu pertumbuhan ekonomi dan kinerja keuangan daerah belum bisa memberikan dampak positif terkait dengan desentralisasi fiskal yang dijalankan di Sulawesi Utara.

Kata kunci: PAD, Pendapatan Transfer, Rasio Kemandirian, Pertumbuhan Ekonomi.

ABSTRACT

The transfer of funding sources is the transfer of taxation and funding assistance through the Transfer funding to Regional mechanism in accordance with the principle of Money Follow Programs. The Government Work Plan is used to arrange the Principle of Money Follow Program by using a budgeting approach. The following budgeting approach is planned, holistic, thematic (focused), and clear (partial) location. This study aims to determine the impact of fiscal decentralization on regional fiscal performance and economic growth within 2005 - 2018 in North Sulawesi. The data analysis focuses on local financing ratio, multiple and simple ordinary least squared regression models. The results of the study find no significant effect of local government revenue and balanced budget on the regional fiscal growth ratio and the ratio of effectivity. However, they do have a significant impact on the regional independence ratio. Local government revenue and balanced budget have significant effect in budget performance. Meanwhile, budget performance has no significant effect to the economy growth. Budget performance therefore seems to have negative relation towards fiscal decentralization in North Sulawesi.

Keywords : *local government revenue, Balanced Budget, regional independence ratio, Economic Growth*

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Selama era Reformasi berlangsung, desentralisasi fiskal dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2001 dengan tujuan Nusantara menjadi milik bersama rakyat Indonesia yang adil. Regulasi pertama memuat tentang Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian terjadi perubahan aturan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Alur penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan perpajakan dan bantuan pendanaan melalui mekanisme Transfer ke Daerah sesuai prinsip *money follow program*. Prinsip *Money Follow Program* merupakan prinsip yang digunakan untuk menyusun program dengan menggunakan pendekatan penganggaran sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yaitu penganggaran yang terencana, menyeluruh (*holistic*), tematik (terfokus), dan lokasi yang jelas (parsial).

Prinsip *Money Follow Program* dilakukan untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Mekanisme Transfer ke Daerah di dasarkan dengan mengurangi ketimpangan yang terjadi antara daerah (*horizontal imbalances*) atau pemerintah pusat dan daerah (*vertical imbalances*). Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah, semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dicatat dan dikelola dalam perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sistem dan prosedur pengelolaan anggaran daerah diatur oleh pemerintah. Pengelolaan anggaran daerah dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabilitas dan berkeadilan sesuai dengan Undang - Undang No.17 Tahun 2003. Keuangan yang di kelola berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik (*good financial governance*) terkait adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Setiap tahunnya pemerintah daerah menyusun anggaran untuk penyelenggaraan pemerintah termasuk pembangunan infrastruktur bidang pelayanan untun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD memiliki fungsi penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari pelayanan pembangunan dan pemberdayaan. APBD juga berfungsi sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi tidak pernah melalui langkah yang melompat - lompat, tetapi merupakan suatu proses yang evolusioner dan bersifat spesifik untuk setiap negara.

Tinjauan Pustaka

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal didefinisikan sebagai penyerahan sebagian tanggung jawab atau keuangan negara dari pemerintah pusat kepada jenjang pemerintahan di bawahnya (provinsi, kabupaten, atau kota). Ukuran untuk desentralisasi Fiskal dengan mengukur perbandingan tahun dari APBD yang diambil dari sisi penerimaan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer.

- Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari pajak lokal, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain PAD yang sah dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Pendapatan Transfer Merupakan pendapatan bersumber dari APBN. Pendapatan transfer bertujuan untuk terlaksananya desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus.

Konsep Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai tingkat besarnya penyimpangan antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan. Indikator keuangan untuk menilai prospek program kerja yang telah diterapkan oleh pemerintah. Indikator yang digunakan untuk mengukur prospek kinerja keuangan yakni,

a. Rasio Pertumbuhan

Menurut Mahmudi (2010 hal.138) Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif.

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan daerah.

c. Rasio efektivitas PAD

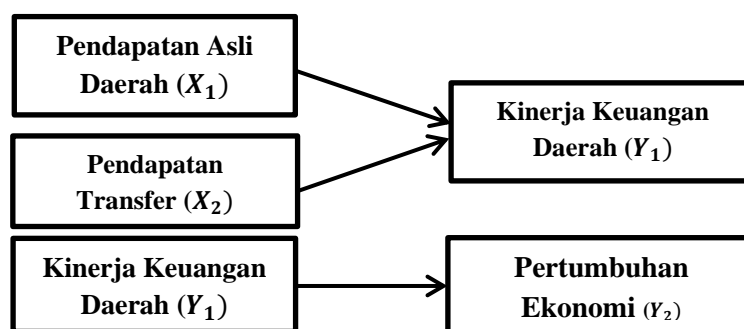
Menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. PAD efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100 atau lebih dari 100%.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kuznet dalam Todaro (2003:99) Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari setiap negara dengan berbagai pasokan kebutuhan perekonomian kepada penduduk di suatu Negara. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tentang kenaikan riil dari suatu Negara dari hasil produksi barang dan jasa.

Kerangka Pemikiran

Dari hasil penjelasan teori – teori yang telah disusun, Sehingga di gambarkan hasil kerangka penelitian berdasarkan hasil kajian teori.



Gambar 1 .Kerangka Pemikiran

2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Badan Pusat Statistika Provinsi Sulawesi Utara dan Kantor Gubernur Sulawesi Utara.

Metode dan Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Objek Penelitian Data

Variabel yang diteliti dalam objek penelitian adalah APBD yang didalamnya terdapat komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Total

Pendapatan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. Data APBD yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran tahun 2005-2018.

Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis rasio dan analisis regresi linier, dengan penjabarannya sebagai berikut:

- 1) Analisis Rasio digunakan untuk melihat Kinerja Keuangan Daerah
- 2) Analisis Regresi Berganda untuk menghitung dampak desentralisasi fiskal terhadap Kinerja Keuangan Daerah
- 3) Analisis Regresi Sederhana untuk melihat pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Analisis Rasio

Analisis ini digunakan untuk melihat kinerja keuangan daerah. Tingkat efisisensi, efektivitas dan pertumbuhan dari target dan realisasi penerimaan daerah secara total, pengeluaran daerah dan realisasi belanja operasional dalam proses pengelolaan keuangan daerah Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2016-2018

- a. Rasio Pertumbuhan

$$\text{RasioPertumbuhan} = \frac{TPD_t - TPD_{t0}}{TPD_{t0}} \times 100\%$$

– *TPD = Total Pendapatan Daerah*

- b. Rasio Kemandirian keuangan daerah

$$\text{RasioKemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Pedoman pola hubungan dengan kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dengan tingkat kemandiriannya pada tabel berikut :

Tabel 1 Presentase Rasio Kemandirian Daerah

Kemampuan daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Source: Suyana Utama (2008)

- c. Rasio Efektivitas terhadap PAD

$$\text{RasioEfektivitasPAD} = \frac{\text{RealisasiPAD}}{\text{AnggaranPAD}} \times 100\%$$

Pedoman penilaian dan kinerja efektifitas terhadap PAD

Tabel 2 Ukuran Rasio Efektivitas Keuangan Pemerintah Daerah

Kemampuan Keuangan	R.Efektivitas (%)
Sangat efektif	100- ke atas
Efektif	90-100
Cukup Efektif	80-90
Kurang Efektif	60-80
Tidak Efektif	Di bawah 60

Source:Kepmendagri 2015

Uji statistika

Uji Statistika untuk mengukur hubungan antara kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dan membandingkan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan kinerja keuangan.

Analisis Regresi Sederhana

Secara matematis model analisis regresi linier berganda dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$$

Di mana variabel yang dihitung adalah

Y_i adalah variable terikat (Pertumbuhan Ekonomi)

x_i nilai dari variabel bebas (Kinerja Keuangan dari salah satu dari hasil 3 rasio)

Analisis Regresi Berganda

Secara matematis model analisis regresi linier berganda dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + v_i$$

Dimana variabel yang dihitung adalah

x_1, x_2 , variabel independen (PAD dan Pertumbuhan Ekonomi)

Y_i variabel dependen (Kinerja Keuangan dari salah satu dari hasil 3 rasio)

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Metode uji normalitas digunakan dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas untuk menunjukkan adanya hubungan antara variable bebas dalam model regresi. Penggunaan uji multikolinearitas untuk menunjukkan adanya derajat kolinearitas yang tinggi di antara variabel-variabel independent.

Uji Heterokedastisitas

Asumsi Homokedastisitas menunjukkan bahwa variasi di setiap t di sekitar rerata 0 tidak tergantung pada nilai variabel bebas. Salah satu cara untuk mendeteksi Heterokedastisitas digunakan dengan uji Goldfelt-Quandt . Pengujian hipotesis mengenai homokedastisitas dan uji F yakni

$H_0 : \sigma^2$ adalah homoskedastisitas

$H_a : \sigma^2$ adalah heterokedastisitas

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak artinya σ_t^2 homokedastisitas

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian Kinerja bagian keuangan dalam APBD Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan menggambarkan tentang potensi yang dimiliki oleh daerah di Sulawesi Utara berdasarkan tahun 2005 sampai 2018.

Tabel 3
Perhitungan Rasio Pertumbuhan
Provinsi Sulawesi Utara 2005 - 2018

Tahun	Total Pendapatan Daerah	Hasil Rasio (%)
2005	488.042.057.000	-
2006	653.592.446.000	25,33
2007	807.320.996.000	19,04
2008	965.147.321.000	16,35
2009	1.023.349.288.000	5,69
2010	1.158.671.349.000	11,68
2011	1.365.705.444.000	15,16
2012	1.834.908.288.000	25,57
2013	2.062.083.090.000	11,02
2014	2.320.810.783.000	11,15
2015	2.527.959.070.000	8,19
2016	3.001.754.654.000	15,78
2017	3.731.908.000.000	19,57
2018	3.773.627.000.000	1,11

Source: BPS, data diolah 2019

Tabel 3 menunjukkan Rasio Pertumbuhan Pendapatan daerah yang dihitung antara tahun 2005 sampai tahun 2018, dimana untuk rasio pertumbuhan Pencapaian Realisasi Pendapatan Daerah Sulawesi Utara tahun 2018 naik 1,11 persen atau terealisasi sebesar Rp.3.773.627.000.000 dari Rp.3.731.908.000.000 pada tahun 2017. Kenaikan rasio tahun 2018 sedikit rendah dari kenaikan tahun 2017 yaitu sebesar 19,57%. Pada tahun 2005 realisasi pendapatan daerah mengalami pencapaian sebesar Rp.488.042.057.000 Realisasi tahun 2005 menjadi tahun dasar untuk melihat perbandingan dengan realisasi pendapatan daerah tahun selanjutnya yaitu tahun 2006 dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp.653.592.446.000 Kenaikan Pendapatan Daerah ditandai dengan naiknya rasio pertumbuhan sebesar 35,33% Meskipun realisasi Pendapatan Daerah meningkat pada tahun 2006, namun rasio pertumbuhan sampai tahun 2009 tercatat menurun 5,96% dengan pencapaian realisasi tahun 2009 sebesar Rp.1.023.349.288.000. Adapun rasio pertumbuhan mengalami kenaikan 25,57% pada tahun 2012 dengan terealisasinya pencapaian pendapatan daerah sebesar Rp. 1.834.908.288.000 dibandingkan dengan tahun 2017 pencapaian rasio yang menurun Rp.3.731.908.000.000.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diukur dengan menggunakan realisasi PAD dan Pendapatan Transfer yang diperoleh dari sumber APBD, sehingga dapat dimuat bentuk tabel untuk dapat memperoleh hasil kemandirian daerah.

Tabel 4
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Provinsi Sulawesi Utara 2005 - 2018

Tahun	Realisasi PAD	Pend.Transfer	T.K.D (%)	Keterangan
2005	198.270.258.000	275.479.569.000	71,97	Sedang
2006	211.236.498.000	442.355.948.000	47,75	Rendah
2007	252.324.235.000	496.496.761.000	50,82	Sedang
2008	322.580.793.000	613.566.528.000	52,57	Sedang
2009	331.083.668.000	674.267.802.000	49,10	Rendah
2010	418.737.661.000	650.530.096.000	64,37	Sedang
2011	535.087.975.000	729.361.142.000	73,36	Sedang
2012	633.650.533.000	933.366.697.000	67,89	Sedang
2013	789.631.755.000	1.029.942.557.000	76,67	Tinggi
2014	937.681.927.000	1.093.949.318.000	85,72	Tinggi
2015	1.012.945.961.000	1.173.041.387.000	86,35	Tinggi
2016	1.141.321.190.000	1.855.433.464.000	61,51	Sedang
2017	1.146.682.000.000	2.508.042.000.000	45,72	Rendah
2018	1.248.650.000.000	2.505.227.000.000	49,84	Rendah

Source: BPS, data diolah 2019

Tabel 4 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan total pendapatan. Pada tahun 2005 hubungan rasio kemandirian keuangan tercatat memiliki pola hubungan partisipatif yaitu sebesar 71,97 persen dengan total pendapatan sebesar Rp.198.270.288.000.

Pola hubungan partisipatif memiliki tingkat kemandirian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal urusan otonomi daerah dengan status kemampuan daerah sedang sehingga peranan campur tangan Pemerintah Pusat mulai berkurang. Porsi total pendapatan Sulawesi Utara tahun 2017 tercatat jauh lebih rendah sebesar 45,72 persen. Tahun 2013 total realisasi anggaran pendapatan Sulawesi Utara cukup baik yakni sebesar 76,67 persen. Sedangkan pada tahun 2014 dan tahun 2015, kenaikan total realisasi pendapatan tercatat lebih tinggi dengan angka persentase yang sama yakni 86,35 persen. Peningkatan total realisasi pendapatan tahun 2014 dan tahun 2015 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami penurunan.

Realisasi pendapatan tahun 2013, 2014 dan 2015 memiliki pola hubungan rasio kemandirian delegatif dimana peranan yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara mandiri dan mampu melaksanakan urusan otonomi daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Tahun 2016 total realisasi pendapatan sebesar 61,51 persen dan pada tahun 2017 sebesar 45,72 persen. Adapun realisasi pendapatan tahun 2018 mengalami peningkatan rasio sebesar 49,84 persen. Pencapaian realisasi pendapatan tahun 2018 memiliki pola rasio kemandirian keuangan tercatat mengalami penurunan yang rendah.

Pencapaian realisasi pendapatan tahun 2018 memiliki pola hubungan rasio kemandirian konsultatif yakni rendah. Kemampuan daerah yang rendah dilakukan oleh pemerintah daerah yang memiliki hubungan campur tangan dengan pemerintah pusat sehingga daerah dianggap sedikit mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

Rasio Efektivitas terhadap PAD

Rasio Efektivitas menggambarkan perbandingan antara realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan target anggaran pendapatan asli daerah, dalam mengukur kemampuan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 5 Perhitungan Rasio Efektivitas Provinsi Sulawesi Utara 2005 - 2018

Tahun	realisasi PAD	anggaran PAD	r.e	Keterangan
2005	198.270.258.000	199.121.052.000	99,57	Efektif
2006	211.236.498.000	301.493.056.000	70,06	Cukup Efektif
2007	252.324.235.000	260.827.110.000	96,74	Efektif
2008	322.580.793.000	296.415.742.000	108,83	Sangat Efektif
2009	331.083.668.000	317.317.317.000	104,34	Sangat Efektif
2010	418.737.661.000	389.762.400.000	107,43	Sangat Efektif
2011	535.087.975.000	516.084.886.000	103,68	Sangat Efektif
2012	633.650.533.000	599.269.276.000	105,74	Sangat Efektif
2013	789.631.755.000	764.063.464.000	103,35	Sangat Efektif
2014	937.681.927.000	991.101.010.000	94,61	Efektif
2015	1.012.945.961.000	1.089.288.358.000	92,99	Efektif
2016	1.141.321.190.000	979.353.945.000	116,54	Sangat efektif
2017	1.146.682.000.000	1.094.319.346.000	104,78	Sangat efektif
2018	1.248.650.000.000	1.168.433.686.000	106,87	Sangat efektif

Source: BPS, data diolah 2019

Tabel 5 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah Sulawesi Utara mengalami peningkatan tahun 2005 sampai tahun 2018. Pada tahun 2005 rasio efektivitas menunjukkan hasil kinerja yang efektif sebesar 99,57 persen. hasil kinerja efektivitas tahun 2005 didorong oleh peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 198.270.258.000. Tahun 2006, realisasi pendapatan asli daerah Sulawesi Utara meningkat sebesar Rp.211.236.498.000 disertai dengan penurunan rasio efektivitas 70,06 persen. Sebaliknya, realisasi pendapatan asli daerah di Sulawesi Utara meningkat sebesar Rp. 252.324.235.000 tahun 2007 dengan naiknya rasio efektivitas yang sudah efektif 96,74 persen. Porsi PAD tahun 2008 sampai tahun 2013 berjalan sangat efektif karena rasio efektivitas pada realisasi dan anggaran pendapatan berada pada angka persentase 100 ke atas. Tahun 2008 rasio efektivitas naik 108,83 persen sehingga realisasi PAD mencapai Rp.322.580.793.000

Realisasi pendapatan tahun 2005 sampai 2018 menunjukkan bahwa porsi PAD tahun 2018 berjalan sangat efektif sebesar 108,87 persen dengan realisasi pendapatan PAD sebesar Rp.1.248.650.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa rasio efektivitas di Sulawesi Utara telah dinilai efektif karena peran pemerintah daerah dalam mengolah kinerja keuangan semakin baik.

Hasil PAD dan Pendapatan Transfer terhadap Kinerja Keuangan (Uji Statistik I)

Berdasarkan teori Regresi Sederhana, model regresi yaitu.

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \beta_2 x_2 \dots \dots + \epsilon_i$$

diubah menjadi,

RKD	=	79.326	+	145.925	LPAD	-	144.717	LPT
SE β_1	=			3.458				3.568
T	=	5.538		42.194				-40.555
R^2	=							0.994
F	=			893.099;				sig=.000

Dimana, Y = Dependent Variable (RKD)
 $\beta_{1,2,3}$ = Konstanta
 x_2 = Independent variable (LPAD, LPT) ;
 SE dan t = Standart Error dan t – value

Hasil Interpretasi regresi sederhana;

- Pada model di atas terlihat bahwa LPAD dan LPT berpengaruh secara statistik signifikan terhadap kinerja keuangan.

- nilai R^2 sebesar 0.994 . Hal ini berarti 99,4% variasi rasio kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh variasi dari dua variable independen PAD dan Pendapatan Transfer.
- Nilai F hitung sebesar 893.099 dengan probabilitas 0.000 . disimpulkan, bahwa koefisien regresi PAD dan Pendapatan Transfer tidak sama dengan nol atau kedua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap rasio kinerja keuangan. Hal ini berarti nilai koefisien determinasi R^2 tidak sama dengan nol atau signifikan.
- Hasil uji t statistic menunjukkan bahwa variable independent x_1 (PAD) dan x_2 (Pendapatan Transfer) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (y_1) dengan nilai signifikansi 0.05.

Hasil Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan ekonomi (Uji Statistik II)

Berdasarkan teori Regresi Berganda, model regresi yaitu.

$$Y_i = \beta_o + \beta X + \varepsilon_i$$

diubah menjadi,

	PE	=	7.034	+	0.009	RKM
SE	β_o	=				0.006
	t	=	17.832			1.446
	R^2	=				0.148
	F	=	2.091			Sig= 0.174

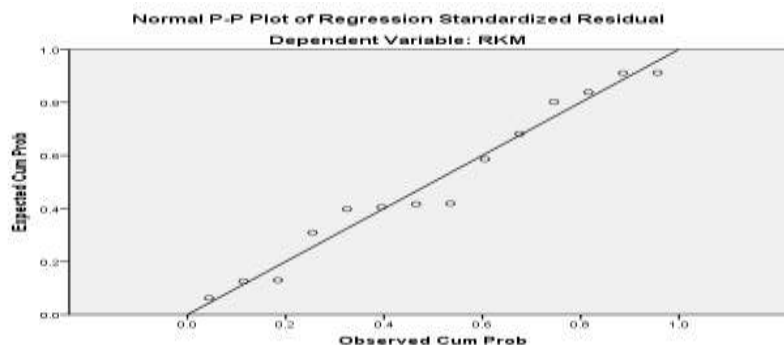
Hasil Interpretasi regresi sederhana;

- Pada model di atas terlihat bahwa Rasio Kemandirian Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara.
- koefisien determinasi (*R square*) adalah 0.148.
- uji F diperoleh nilai F hitung 2.091 dengan nilai signifikan 0.174. Dari hasil perbandingan F hitung dengan F tabel, maka ditarik kesimpulan menerima H_o yang berarti koefisien korelasi tidak signifikan secara statistik.
- Hasil uji t menunjukkan nilai koefisien konstanta 7.034 dengan t hitung 17.832 dan nilai signifikan 0.000. Koefisien slope RKM adalah 0.009 nilai t hitung 1.446 dan nilai signifikan 1.446.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tampilan grafik histogram disimpulkan bahwa grafik histogram membeirkan pola distribusi yang normal. Pada grafik normal plot, data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau garis histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normal.



Gambar 2. Grafik histogram distribusi normal

Uji Multikolinearitas

Penggunaan uji multikolinearitas untuk menunjukkan adanya derajat kolinearitas yang tinggi di antara variabel-variabel independent

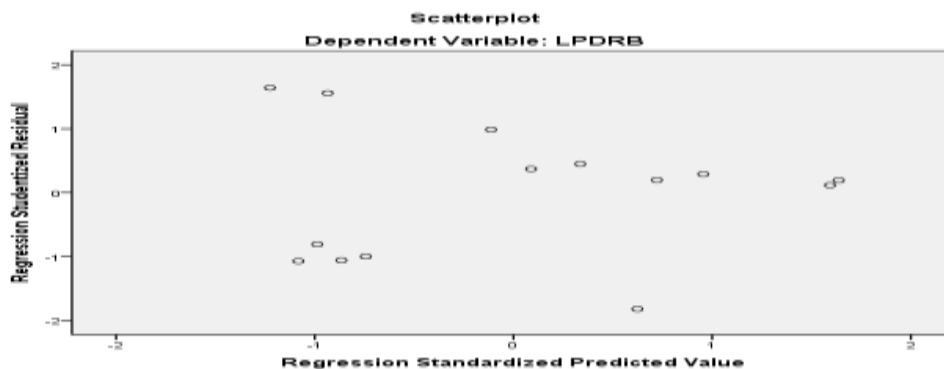
R square	0.994	
Korelasi pair wise LPT dan LPAD	-0.942	
Nilai parsial	LPAD =.997	LPT = -.997

Hasil Intepretasi uji multikolinaritas bahwa :

- nilai R^2 sebesar 99.4% menunjukkan hasil yang tinggi pada variabel independen PAD dan Pendapatan Transfer
- hasil korelasi antara LPAD dan LPTD sebesar - 0.942. Tidak terdapat pair - wise korelasi antar variabel independen yang tinggi di atas 0.80. Jadi dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen.
- Nilai parsial korelasi variabel x_1 (PAD) berkisar 0.997 dan variabel x_2 (Pendapatan Transfer) berkisar - 0.997. Oleh karena nilai parsial korelasi juga tinggi, maka tidak ada indikasi terjadinya multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Hasil *scatterplot* menunjukkan sebaran plot tidak beraturan, sehingga tidak menunjukkan terdapat heterokedastisitas.



Gambar 3. Grafik Scatterplot

Pembahasan

Peran Dampak Desentralisasi fiskal untuk dapat mengetahui apakah wewenang yang diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat menjalankan tanggung jawab untuk mendirikan daerah yang otonom. Sehingga, untuk dapat menurut dampak desentralisasi dipilih 2 variabel bebas yang bersumber dari APBD. Variabel tersebut PAD dan Pendapatan Transfer. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur dampak desentralisasi fiskal yaitu dengan menggunakan metode rasio kinerja dan uji statistika. Dari hasil perhitungan rasio.

Rasio 1; Rasio Pertumbuhan menunjukkan bahwa total pendapatan daerah provinsi Sulaersi utara berfluktuasi selama tahun 2005 sampai tahun 2018. Naik dan turunnya rasio pertumbuhan Sulawesi Utara menyatakan bahwa potensi yang dimiliki Sulawesi Utara negatif.

Rasio 2 ; Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan bahwa pembiayaan daerah dari tahun 2005 sampai tahun 2018 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa

pembiayaan pemerintah provinsi Sulawesi Utara terhadap masyarakat berada pada pola partisipatif.

Dimana tingkat kemandirian keuangan di Sulawesi Utara telah mampu melaksanakan otonomi daerah dan peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang. Berarti pelaksanaan otonomi di daerah Sulawesi Utara hampir mampu untuk tidak terivensi dengan peranan dari Pemerintah Pusat.

Rasio 3; Rasio Efektivitas PAD Sulawesi Utara yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hasil kinerja Provinsi Sulawesi Utara mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sulawesi Utara telah menunjukkan hasil yang sangat efektif sebesar 106.87%. Disimpulkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam menghasilkan PAD sudah sangat efektif.

Alat Ukur ke 2 yg digunakan yaitu, Uji statistika untuk menguji apakah PAD dan Pendapatan Transfer berpengaruh positif atau negatif terhadap 3 rasio kinerja.

Hasil Uji statistika 1 pertama, diukur menggunakan uji regresi berganda. Hasil dari regresi berganda dimana variabel x_1 dan x_2 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap rasio kinerja (Rasio Kemandirian Keuangan Daerah). Hasil uji statistika diperoleh nilai F hitung sebesar 893.099 dengan probabilitas 0.000. Oleh karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05, maka disimpulkan bahwa koefisien regresi PAD dan Pendapatan Transfer tidak sama dengan nol atau kedua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap rasio kinerja keuangan. Hal ini berarti nilai koefisien determinasi R^2 tidak sama dengan nol atau signifikan.

Hasil Uji Statistika kedua, diukur menggunakan Regresi Sederhana. Regresi sederhana menghubungkan antara 2 variabel yaitu kinerja keuangan (rasio kemandirian) sebagai variabel bebas dan pertumbuhan ekonomi sebagai pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian dinilai dari uji F diperoleh nilai F hitung 2.091 dengan nilai signifikan 0.174. Dari hasil perbandingan F hitung dengan F tabel, maka ditarik kesimpulan menerima H_0 yang berarti koefisien korelasi tidak signifikan secara statistik.

Hasil Uji statistika ke-tiga, diukur menggunakan Uji Asumsi Klasik. Uji asumsi klasik menekankan pada 3 uji, uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas.

Uji Normalitas dilihat dari tampilan grafik histogram dirangkum bahwa grafik histogram membeirkan pola distribusi yang normal. Pada grafik normal plot, data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau garis histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normal. Uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil output matriks korelasi, pair – wise korelasi antara LPT dan LPAD sebesar – 0.942, dan korelasi antara LPAD dan LPTD sebesar – 0.942. Tidak terdapat pair – wise korelasi antar variabel independen yang tinggi di atas 0.80. Jadi dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Uji Heterokedastisitas. Hasil scatterplot menunjukkan sebaran plot tidak beraturan, sehingga tidak menunjukkan terdapat heterokedastisitas.

Variabel x_1 (PAD) dan x_2 (Pendapatan Transfer) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini sesuai dengan teori keuangan daerah bahwa penyeleggaran fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggara urusan pemerintahan diikuti dengan pencarian sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Dan juga sesuai penelitian Mustika Sari bahwa, rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Solok sedangkan rasio kemampuan keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Solok.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian ini, sebagai berikut :

1. kinerja keuangan yang memiliki hasil yang positif yaitu rasio kemandirian, sedangkan rasio pertumbuhan dan rasio efektivitas tidak memiliki hasil yang positif melainkan negatif. Sehingga rasio pertumbuhan dan rasio efektivitas tidak dapat digunakan untuk menghitung hubungan antara 2 variabel bebas PAD dan Pendapatan transfer.
2. PAD dan pendapatan transfer berpengaruh signifikan dan mempunyai arah positif terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
3. Kinerja Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang perlu diajukan lagi antara lain:

- Pemerintah daerah perlu memanfaatkan anggaran pendapatan dengan membuat fasilitas umum menjadi lebih baik lagi seperti halte, bus damri, jalur sepeda (khususnya di kota). Hal – hal kecil seperti itu sangat bermanfaat untuk masyarakat dan dapat menjadi nilai tambah bagi Provinsi Sulawesi Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Kuangan Republik Indonesia*. (2016, Juli 20). Diambil kembali dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-jelaskan-konsep-money-follow-program-dalam-rapbn-2017/>
- Basri, H. (2013). Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupata/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1, 83.
- Karianga, H. (2017). *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik*. Depok: Kencana.
- Pramita, P. (2015). *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Suwandi. (2015). *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua*. Yogyakarta: Deepublish